

Dinamika Konflik Publik terhadap Kebijakan Kenaikan Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia

Nailus Sa'adah¹, Nabilla Indra Rukmana², Dewi Sireweni Wandari³, Fabio Tomindo Jore⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

Email: 24040674369@mhs.unesa.ac.id

Abstract. This study analyzes the dynamics of public conflict in response to the policy of converting official residences into housing allowances for members of the Indonesian House of Representatives (DPR RI). This policy sparked controversy because it was deemed inconsistent with the depressed socio-economic conditions of the community, giving rise to perceptions of distributive injustice. Using qualitative methods with a descriptive-analytical approach, data were collected through policy documentation studies, scientific literature, and observation of opinions in digital media (X and Instagram). The results indicate that the escalation of the conflict was triggered by three main factors: economic inequality, low transparency, and minimal public participation. Social media played a significant role in accelerating the polarization of narratives between political elites and the public, which then shifted administrative issues into questions of morality and ethics. Weak public communication regarding this policy resulted in declining institutional legitimacy and increased public skepticism towards the DPR RI. This study concludes that implementing good governance principles through budget transparency and public involvement is crucial in formulating future policies to maintain social stability and public trust.

Keywords: Housing Allowance, DPR RI, Social Conflict, Distributive Injustice, Public Trust, Social Media.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis dinamika konflik publik sebagai respons terhadap kebijakan pengalihan fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI. Kebijakan ini memicu polemik karena dinilai tidak selaras dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sedang tertekan, sehingga memunculkan persepsi ketidakadilan distributif. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi kebijakan, literatur ilmiah, serta observasi opini di media digital (X dan Instagram). Hasil penelitian menunjukkan bahwa eskalasi konflik dipicu oleh tiga faktor utama: ketimpangan ekonomi, rendahnya transparansi, dan minimnya partisipasi publik. Media sosial berperan signifikan dalam mempercepat polarisasi narasi antara elit politik dan rakyat, yang kemudian menggeser isu administratif menjadi persoalan moralitas dan etika. Lemahnya komunikasi publik dalam kebijakan ini berdampak pada menurunnya legitimasi lembaga dan meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap DPR RI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* melalui transparansi anggaran dan pelibatan publik sangat krusial dalam perumusan kebijakan di masa depan guna menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Tunjangan Perumahan, DPR RI, Konflik Sosial, Ketidakadilan Distributif, Kepercayaan Publik, Media Sosial.

Received Apr 12, 2026; Revised Apr 22, 2026; Accepted May 29, 2026

* Nailus Sa'adah: Email: 24040674369@mhs.unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai peran penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat melalui legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankannya (Asshiddiqie, 2006). Dalam pelaksanaan tugas itu, sangat diperlukan transparansi dan etika menjadi hal yang sangat penting agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada rakyat dan terhindar dari adanya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sejumlah kebijakan yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, sehingga memunculkan berbagai kritik, saran dan tuntutan akan perbaikan kinerja DPR.

Realisasi kebijakan ini terlihat jelas sebagaimana dilaporkan oleh [Kompas.com](#) (2024) kebijakan tunjangan perumahan Anggota DPR periode baru ini menggantikan fasilitas rumah dinas dengan nominal mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Meskipun secara administratif merupakan komponen tunjangan, publik secara luas memandang kebijakan ini sebagai bagian dari skema kenaikan gaji dan fasilitas elit politik yang tidak proporsional. Kebijakan ini memancing polemik karena ditetapkan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi, seperti kenaikan harga BBM, harga beras, serta peningkatan beban pajak. Ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang lebar antara standar kesejahteraan pejabat negara dengan realitas ekonomi rakyat. Sebagaimana ditegaskan oleh Hardjaloka (2015), pengalokasian anggaran untuk pejabat negara harus senantiasa mengedepankan asas keadilan sosial dan sensitivitas terhadap kondisi fiskal negara agar tidak memicu krisis kepercayaan publik.

Ketimpangan antara kebijakan peningkatan tunjangan pejabat dan kondisi ekonomi masyarakat seringkali memunculkan respons negatif dari publik. Di Indonesia, kebijakan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR periode 2024–2029 mendapat sorotan karena ditetapkan ketika masyarakat masih menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli (Kompas.com, 2024). Situasi serupa juga terjadi di Ghana pada tahun 2023, ketika pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sebesar 30 persen di tengah tingkat inflasi yang mencapai 54 persen (Reuters, 2023). Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan fasilitas pejabat pada masa tekanan ekonomi berpotensi menimbulkan konflik publik serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kritik-kritik mulai bermunculan di media sosial hingga ruang-ruang diskusi publik, mencerminkan kurangnya rasa percaya dan menurunnya kepercayaan terhadap prioritas kinerja lembaga legislatif. Masyarakat merasa bahwa di tengah-tengah tuntutan efisiensi anggaran negara, keputusan DPR justru lebih menaruh beratkan pada fasilitas internal justru menunjukkan lemahnya sensitivitas etis terhadap kondisi rakyat. Penolakan ini tidak

hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga menyangkut rasa keadilan sosial yang terganggu akibat kesenjangan yang terjadi. Hal ini sejalan dengan pandangan Burhanuddin Muhtadi (2019) yang menegaskan bahwa menurunnya kepercayaan masyarakat seringkali dipicu oleh persepsi bahwa kebijakan yang diambil tidak lagi sejalan dengan aspirasi dan kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik eksternal antara lembaga legislatif dan masyarakat terkait kebijakan kenaikan tunjangan, serta implikasinya terhadap manajemen konflik dalam organisasi publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika konflik publik yang muncul sebagai tanggapan terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana konflik eksternal yang berlangsung antara masyarakat dengan lembaga legislatif, khususnya tentang respon publik terhadap kebijakan tunjangan perumahan yang dianggap merupakan satu dari penambahan fasilitas untuk pejabat negara. Selain itu, penelitian ini juga

menganalisis faktor-faktor daripada pemicu munculnya konflik tersebut, termasuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat, pandangan tentang ketidakadilan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap DPR. Penelitian ini mengkaji bagaimana konflik ini berkembang di ruang publik serta dampaknya terhadap legitimasi kebijakan dan manajemen konflik dalam organisasi publik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik, dari segi teori maupun praktik, secara teori penelitian ini dapat memperkaya literatur di ranah kebijakan publik dan administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan konflik publik, legitimasi kebijakan, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi DPR dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih transparan, adil, dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman kepada masyarakat tentang dinamika konflik dalam kebijakan publik serta pentingnya partisipasi dalam mengawasi kebijakan. Untuk para akademisi, penelitian ini bisa menjadi sumber rujukan dalam pengembangan studi lanjutan terkait konflik dalam organisasi publik dan pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengkaji fenomena sosial terkait dinamika konflik publik yang timbul sebagai reaksi atas kebijakan penambahan tunjangan perumahan bagi anggota DPR. Metode deskriptif digunakan untuk secara sistematis merinci fakta dan fenomena yang ada, serta melakukan analisis mendalam berdasarkan data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diakses melalui tinjauan literatur. Data dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi terhadap kebijakan resmi dari Sekretariat Jenderal DPR RI, serta penelitian literatur dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan berita media yang relevan berkaitan dengan kebijakan publik dan pengelolaan konflik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan observasi pada platform media digital untuk menangkap dinamika tanggapan masyarakat di platform X (Twitter) dan Instagram, secara khusus berkenaan dengan narasi ketidakadilan sosial yang berkembang di ruang publik.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu studi dokumentasi, studi pustaka, dan observasi media digital. Studi dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dari dokumen resmi kebijakan, sementara studi pustaka dilaksanakan dengan menelaah literatur akademik yang relevan sebagai dasar analisis. Observasi media digital bertujuan untuk mengidentifikasi pola tanggapan dan pendapat publik terhadap kebijakan yang sedang dikaji.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menerapkan analisis kualitatif deskriptif yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang relevan sesuai fokus penelitian. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi sistematis agar mudah dipahami. Kemudian, penarikan kesimpulan diambil melalui interpretasi data dengan membandingkan data nominal tunjangan dengan kondisi fiskal dan sosial-ekonomi masyarakat untuk memahami dinamika konflik publik yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Kebijakan Fasilitas (Data dan Nominal)

Temuan adanya perubahan dalam sistem pemberian fasilitas bagi Anggota DPR RI periode 2024-2029. Berdasarkan surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/2561/KU.00/09/2024 yang diputuskan bahwa pemberian fasilitas Rumah Jabatan Anggota diadakan dan diganti dengan tunjangan Perumahan tunai. Walaupun angka pasti disesuaikan dengan perubahan harga sewa hunian di kawasan Senayan dan Jakarta Pusat, data yang tersebar di publik menunjukkan angka di kisaran Rp30.000.0000 hingga Rp50.000.000 per bulan untuk setiap anggota. Perubahan dari aset negara menjadi tunjangan uang mengubah sifat pengawasan anggaran. Jika sebelumnya negara membiayai perawatan fisik melalui mekanisme tender, kini dana tersebut diberikan secara lumpsum kepada anggota tanpa kewajiban melaporkan bukti kwitansi sewa secara mendetail kepada publik. Kebijakan ini dibuktikan oleh media nasional [kompas.com](https://www.kompas.com) (2024) sebagai langkah efisiensi administrasi, namun ditanggapi secara skeptis oleh masyarakat karena besaran angka yang dianggap tidak wajar.

Gagasan Kondisi Ekonomi dan Tekanan Fiskal

Data di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini muncul di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang mengalami tekanan.

KOMPONEN PERBANDINGAN	ESTIMASI NOMINAL (per bulan)	KETERANGAN
Tunjangan Perumahan DPR	Rp30.000.000- Rp50.000.000	Data Tunai (lumpsum), non pajak
UMP Rata-rata Nasional	Rp.3.313.359	Kenaikan hanya 3,6% (2024)
Gaji Guru Honorer (Rata-rata)	Rp500.000-Rp1.500.000	Jauh dibawah standar
Rasio selisih	10-15x lipat	Tunjangan DPR vs Pendapatan Rakyat

Sumber: Data dari Sekjen DPR dan Kemnaker (2024)

Selain ketimpangan angka pada tabel, data lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini muncul di tengah ekonomi masyarakat. Selama tahun 2024, harga pokok terutama beras mengalami anomali harga yang melampaui Harga Eceran Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi ini diperburuk karena adanya kenaikan PPN menjadi 12%. Reaksi publik menunjukkan sentimen negatif dimana narasi ketidakadilan antara “elit politik” vs “rakyat” menjadi tema utama perbincangan. Kasus ini memiliki kesamaan pola dengan kasus Ghana pada tahun 2023, di mana kenaikan fasilitas pejabat di tengah inflasi tinggi memicu krisis kepercayaan publik yang padat.

Reaksi Publik: Kontruksi Narasi “Elit” vs “Rakyat”

Konflik publik terhadap kebijakan tunjangan perumahan DPR RI secara padat melalui berbagai komunikasi, baik media massa maupun platform digital. Temuan ini menunjukkan bahwa reaksi publik tidak hanya bersifat spontan, namun terkonsolidasi dalam sebuah narasi

besar identitas “elit politik” vs “rakyat”. Media massa berperan dalam membingkai kebijakan ini sebagai isu ketidakadilan sosial dengan diksi ironi di tengah kesulitan ekonomi. Hal ini menciptakan gelombang skeptisme yang meluas. Di ruang digital, khususnya pada platform X (Twitter) dan Instagram, konflik ini bukan sekadar luapan emosi melainkan “pembangkangan sipil digital” yang menuntut akuntabilitas etis. Masyarakat menggunakan konten kreatif sebagai senjata untuk mendelegitimasi kebijakan yang dianggap tidak memiliki dasar keadilan sosial, dinamika reaksi publik terlihat lebih agresif melalui perbandingan kelas sosial. Masyarakat secara mandiri membuat konten kreatif yang menyandingkan nominal tunjangan perumahan pejabat dengan realitas hidup rakyat kecil seperti rata-rata gaji guru honorer atau buruh pabrik. Munculnya tagar dan diskusi viral ini menunjukkan adanya “pembangkangan sipil digital” sebagai respon atas tersumbatnya jalur partisipasi formal dalam pengambilan kebijakan tersebut. Penolakan publik ini tidak lagi sekadar memperdebatkan angka, melainkan sudah menyentuh aspek moralitas dan etika publik.

Dampak Konflik terhadap Legitimasi Kebijakan dan Kepercayaan Publik

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik publik yang muncul atas kebijakan tunjangan perumahan DPR RI berdampak pada penurunan legitimasi kebijakan. Legitimasi tidak hanya ditentukan oleh legalitas hukum, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat. Ketika kebijakan dianggap tidak sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi yang ada, maka tingkat penerimaan publik cenderung menurun. Dalam perspektif keadilan yang dikemukakan Rawls (1971), sebuah kebijakan seharusnya memenuhi prinsip keadilan distributif, yaitu memberikan manfaat yang proporsional dan tidak memperburuk kesenjangan sosial. Namun, perbedaan signifikan antara tunjangan DPR dan kondisi ekonomi masyarakat saat ini memunculkan persepsi ketidakadilan, yang pada akhirnya dapat memperparah konflik. Penurunan legitimasi ini berdampak pada melemahnya kepercayaan publik, tanggapan negatif yang ada di media dan platform digital menunjukkan adanya peningkatan skeptisisme terhadap lembaga legislatif. Oleh karena itu, konflik ini tidak hanya mengindikasikan penolakan masyarakat terhadap sebuah kebijakan, tetapi juga menandakan adanya krisis legitimasi serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pembahasan

Konflik Publik Sebagai Akibat Kebijakan

Kebijakan pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR memperlihatkan bahwa adanya konflik publik bisa menjadi akibat ketika kebijakan tidak sesuai dengan situasi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam pandangan konflik sosial, Lewis A. Coser (1956) menyatakan bahwa konflik muncul karena perbedaan kepentingan dan distribusi sumber daya yang dianggap tidak adil. Dalam hal ini, masyarakat melihat kebijakan tunjangan sebagai bentuk ketidakadilan dalam alokasi anggaran negara, di mana kepentingan elit politik dianggap lebih diperhatikan dibandingkan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Konflik yang terjadi tidak hanya bersifat administratif atau ekonomi, tetapi juga meluas menjadi konflik nilai yang berkaitan dengan pandangan tentang keadilan sosial. Ini menunjukkan bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan dimensi moral masyarakat. Ketika kebijakan dianggap tidak peka terhadap kondisi warga, maka kemungkinan terjadinya resistensi sosial akan semakin meningkat.

Legitimasi Kebijakan dalam Sudut Pandang Publik

Legitimasi memainkan peranan penting dalam menentukan sukses suatu kebijakan publik. Menurut Mark C. Suchman (1995), legitimasi terbentuk saat tindakan pemerintah dianggap sesuai dengan norma serta nilai yang dipegang oleh masyarakat. Dalam konteks tunjangan perumahan DPR, legitimasi kebijakan telah menurun karena masyarakat beranggapan bahwa kebijakan tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial.

Walaupun kebijakan ini memiliki landasan hukum yang valid, legitimasi tidak hanya ditentukan oleh aspek formalitas hukum, melainkan juga oleh penerimaan masyarakat. Thomas R. Dye (2013) menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun penerimaan di kalangan masyarakat. Ketidakcocokan antara kebijakan yang diterapkan dan harapan publik menimbulkan penolakan yang memperburuk konflik.

Keadilan Distribusi dalam Pengelolaan Anggaran Negara

Perselisihan masyarakat terkait kebijakan ini berkaitan erat dengan pandangan tentang ketidakadilan dalam distribusi. John Rawls (1971) menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil dan seimbang untuk semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang beruntung.

Secara nyata, masyarakat sering kali membandingkan tunjangan anggota DPR dengan keadaan ekonomi kelompok-kelompok lain seperti guru honorer dan pekerja lepas. Perbandingan semacam ini memperkuat anggapan bahwa kebijakan yang ada tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial yang diharapkan. Oleh karena itu, keadilan dalam distribusi menjadi elemen kunci yang memengaruhi seberapa baik masyarakat menerima kebijakan publik.

Penurunan Kepercayaan Publik terhadap DPR

Kepercayaan dari masyarakat adalah dasar penting untuk mempertahankan kestabilan hubungan antara pemerintah dan warganya. Burhanuddin Muhtadi (2019) menyampaikan bahwa persepsi terhadap keterbukaan, akuntabilitas, dan objektivitas kebijakan berdampak pada tingkat kepercayaan publik.

Perubahan dari fasilitas rumah dinas ke tunjangan tunai menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengawasan penggunaan anggaran dilaksanakan. Minimnya transparansi dalam penerapan kebijakan ini memperburuk pandangan masyarakat terhadap DPR. Situasi ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang gagal membangun kepercayaan publik bisa melemahkan legitimasi lembaga-lembaga politik.

Media Sosial Sebagai Sarana Eskalasi Konflik

Kemajuan media sosial telah menciptakan ruang interaksi yang lebih luas antara masyarakat dan pemerintah mengenai kebijakan publik. Dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai saluran utama bagi masyarakat untuk mengungkapkan kritik, membangun opini, serta memperkuat narasi ketidakadilan.

Rose-Ackerman (1999) menyebutkan bahwa rendahnya transparansi dalam kebijakan dapat memicu resistensi di kalangan masyarakat. Media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi sekaligus meningkatkan intensifikasi konflik melalui opini publik yang meluas. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital mempunyai peran yang signifikan dalam dinamika konflik publik saat ini.

Manajemen Konflik dalam Organisasi Publik

Dalam tinjauan manajemen konflik, reaksi lembaga legislatif terhadap penolakan publik cenderung menggunakan pendekatan menghindari atau bersaing, di mana kebijakan diterapkan tanpa adanya dialog yang melibatkan semua pihak. Menurut Thomas dan Kilmann (1974), cara ini kurang efektif untuk meredakan konflik yang melibatkan kepentingan publik yang luas.

Untuk menurunkan eskalasi konflik, perlu diadopsi metode yang lebih kolaboratif, seperti berkompromi atau berkolaborasi, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini dapat meningkatkan tingkat transparansi, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dampak Jangka Panjang terhadap Stabilitas Politik

Konflik publik yang tidak ditangani dengan baik dapat membawa konsekuensi jangka panjang negatif bagi stabilitas politik. Ketidakpuasan yang terus menerus dari masyarakat bisa berujung pada apatisme politik dan berkurangnya partisipasi dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, konflik yang tidak terselesaikan mencerminkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, konflik perlu dianggap sebagai indikator penting yang menggambarkan perlunya perbaikan dalam proses pengambilan keputusan.

Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Solusi Kebijakan

Keterbukaan dan akuntabilitas adalah langkah-langkah utama untuk meredakan konflik publik. Keterbukaan berhubungan tidak hanya dengan akses informasi, tetapi juga dengan kejelasan tentang cara penggunaan anggaran. Di sisi lain, akuntabilitas meminta adanya tanggung jawab yang jelas dari para pembuat kebijakan terkait keputusan yang mereka buat. Penerapan prinsip-prinsip good governance menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dengan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas, kemungkinan terjadinya konflik dapat diminimalisir dan kekuatan kebijakan dapat diperkuat.

Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan

Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan menjadi salah satu penyebab meningkatnya konflik. Keterlibatan publik adalah aspek krusial dalam merancang kebijakan yang peka dan melibatkan semua pihak. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui pertemuan konsultasi publik, polling, atau media digital. Dengan keikutsertaan yang aktif, masyarakat tidak hanya dijadikan objek kebijakan, tetapi juga berperan dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat mengurangi penolakan serta meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang dihasilkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik publik mengenai kebijakan tunjangan rumah untuk anggota DPR RI pada periode 2024-2029 merupakan realisasi dari konflik eksternal yang terjadi akibat ketidakmerataan akses sumber daya negara. Kebijakan ini memicu legitimasi sosial karena publik melihat adanya kesenjangan antara standar kesejahteraan pejabat dengan realitas ekonomi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan fiskal.

Meskipun kebijakan ini didasarkan pada landasan hukum yang sah, namun kegagalannya dalam memenuhi prinsip keadilan distribusi telah memicu protes masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Narasi “Elit vs Rakyat” yang muncul menunjukkan bahwa kebijakan publik yang kurang peka dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akan mengarah pada meningkatnya skeptisisme dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen konflik yang diterapkan saat ini masih bersifat searah dan belum mengedepankan pendekatan kolaboratif yang bersifat transparan.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press. Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Boston: Pearson.
- Hardjaloka, L. (2015). Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Kajian DPR RI*.
- Kompas.com. (2024, October 6). Menyoal tunjangan perumahan anggota DPR: Efisiensi atau pemborosan anggaran? *Kompas.com*.
- Muhtadi, B. (2019). *Populisme dan Politik Identitas di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Rahim, M. A. (2002). *Managing Conflict in Organizations* (3rd ed.). Westport: Quorum Books.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Reuters. (2023, January 12). Crisis-hit Ghana increases public servant salaries by 30%. *Reuters*.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rothstein, B. (2011). *The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective*. Chicago: University of Chicago Press.
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (1974). *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument*. New York: CPP Inc.